

**SANKSI PELANGGARAN ADAT TERHADAP PELAKSANAAN
WALIMATUL ‘URSY PADA SUKU MELAYU (STUDY KASUS DI
DESA RANTAU BARU KECAMATAN KERINCI KABUPATEN
PELALAWAN) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih
Gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy)**



OLEH

**HERI PURNOMO
NIM: 10721000388**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI’AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIA
2013**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Sanksi Pelanggaran Adat Terhadap Pelaksanaan Walimatul ‘Urusy Pada Suku Melayu (Study Kasus Di Desa Rantau Baru Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan) Dalam Tinjauan Hukum Islam”**. merupakan studi kasus Desa Rantau Baru Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau.

Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah apa yang termasuk pelanggaran adat terhadap pelaksanaan *walimatul ‘urusy*, bagaimana sanksi adat terhadap pelanggaran pelaksanaan *walimatul ‘urusy* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pelanggaran adat dalam pelaksanaan *walimatul ‘urusy* di Desa Rantau Baru Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi adat terhadap pelaku pelanggaran pada pelaksanaan *walimatul ‘urusy*, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran adat dalam pelaksanaan *walimatul ‘urusy* di Desa Rantau Baru Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau.

Penelitian ini bersifat lapangan, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara. Sebagai data primer yaitu data yang diperoleh dari responden, pemuka adat dan data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari aparat pemerintah setempat ditambah dengan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Setelah data terkumpul, maka penulis menganalisis data dengan metode analisis data kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah metode deduktif, induktif dan deskriptif analitik

Adapun hasil dari penelitian ini adalah apabila seseorang yang melanggar adat pada pelaksanaan *walimah*, seperti tidak meminta izin kepada ninik mamak, tidak menyerahkan rumah kepada ketua simondo, dan memasang tonggol tumbang, maka ia akan dikenai sanksi adat berupa membayar kambing. Adapun dalam pelaksanaan sanksi tersebut, setelah ada keputusan dengan melalui proses adat oleh ninik mamak, datuk sati maka, pelaku pelanggaran adat terhadap pelaksanaan *walimatul ‘urusy*

membayar sanksi dengan memotong kambing atau kerbau sesuai dengan keputusan datok sati, setelah dipotong kambing atau kerbau tersebut lalu dimasak dan mengundang semua masyarakat yang ada di desa tersebut untuk dimakan bersama-sama

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan ini, penulis mengamati, sanksi yang diberikan seperti wajib memotong kerbau bertentangan dengan ketentuan syari'at islam. Apabila melanggar ketentuan adat yang berlaku sebelum pelaksanaan *walimah*, maka sebelum melangsungkan acara *walimatul 'urusy* bagi yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi adat wajib membayar atau memotong kerbau sebagai denda adat, setelah sanksi adat telah dipenuhi barulah pelaksanaan *walimah* boleh dilanjutkan kembali walaupun itu hanya seperti selamatan biasa. Hal seperti ini sangat memberatkan bagi seseorang yang akan melaksanakan *walimatul 'urusy* karena tidak semua orang memiliki ekonomi yang memadai untuk memenuhi sanksi tersebut.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sedalam syukur dan setinggi puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“SANKSI PELANGGARAN ADAT TERHADAP PELAKSANAAN WALIMATUL ‘URUSY PADA SUKU MELAYU (STUDY KASUS DI DESA RANTAU BARU KECAMATAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM”**.

Shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan alam nabi Muhammad SAW. yang telah menegaskan kalimat Tauhid serta membimbing umatnya ke jalan yang penuh cahaya dan semoga kita termasuk kaum yang mendapat syafaatnya di hari akhir nanti, Amin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda M. Darmin dan Ibunda Rosmiyati tercinta yang tak pernah lupa mendo'akan penulis dan tidak pernah merasa lelah memberikan motivasi, mencurahkan cinta, kasih sayang, dan perhatian siang dan malam sehingga penulis dapat meraih cita-cita mulia menjadi seorang hamba yang berilmu pengetahuan.

Di dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. DR. H. M. Nazir M.A selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta Purek I, II, III yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.
2. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta pembantu Dekan I, II dan III dan terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen yang telah memberi ilmu kepada penulis.
3. Bapak Drs. Yusran Sabili, M.Ag dan Bapak Drs. Zainal Arifin, M.Ag selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Ahwal al-Syakhshiyah yang telah banyak menyumbangkan ilmu, waktu, bimbingan dan motivasi yang selalu diberikan.
4. Bapak Zulfahmi B, M.Ag, yang telah menjadi Penasehat Akademis selama penulis kuliah hingga menyelesaikan studi di UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Nasir Cholis M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu serta memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi sehingga penulis berhasil menyelesaikan penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum terutama dosen pada jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis semoga dapat penulis amalkan.

7. Yang terhormat Bapak Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dan Bapak kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum beserta staf yang telah melayani memberikan bantuan menyedukakan buku-buku yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Riman dan Situm (Kakek & Nenekku tercinta), H.M. Yusuf dan Hj. Maryati (paman & Bude), serta 10 saudara kandung ku, Winarti, Dewi astute, Wahyudi, Yuli Yana, Sucipto, Yunita, Tri susilawaty, Indra, Wiwiek Lestari, dan yang tersayang Zaharatul Akhya Saudara (Keponakanku yang imut semua). Yang telah banyak memberi motivasi kepada penulis. Semoga Allah memberikan lindungan, hidayah serta kesehatan, *Jazakumullah Khairan Katsiron*.
9. Terimakasih kepada Nurmalasari, S.Pd.I yang telah memotivasi,yang telah support, membantu, yang telah meluangkan waktunya,pikiran serta tenaganya untuk ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Serta untuk teman-temanku, M. Yazid, Tengku syafrizal, Nanang Kasim, Nia, Dewi, Iyah & serta teman-teman seperjuangan khususnya AH3 angkatan 2007, Imron, Ayu, Arifin, Jun, Rouf serta teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan kalian semua, karena kalian memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.

11. Terima kasih kepada teman-teman HIPPMAT (Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tempuling Pekanbaru) yang juga mensupport penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan dari Allah SWT. Dan penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan yang pernah penulis lakukan baik yang sengaja maupun tidak sengaja.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, dan dapat memberikan sumbangan fikiran dalam pembangunan dunia pendidikan.

wassalam wr.wb

Pekanbaru, 20 Juni 2013

Heri Purnomo

DAFTAR ISI

MOTTO.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II GAMBARAN UMUM DESA RANTAU BARU	
A. Keadaan Geografis dan Demografis	15
1. Geografis Daerah.....	15
2. Demografis Daerah.....	16
B. Kehidupan Beragama dan Pendidikan	19
1. Kehidupan Beragama	19
2. Pendidikan.....	22
C. Adat Istiadat	25
 BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WALIMATUL ‘URUSY DAN SANKSI	

	A. Pengertian <i>Walimatul ‘Urusy</i>	28
	B. Pendapat Ulama tentang <i>Walimatul ‘Urusy</i>	29
	1. Hukum dan Dasar Hukum <i>Walimatul ‘Urusy</i>	29
	2. Waktu Pelaksanaan <i>Walimatul ‘Urusy</i>	31
	3. Hukum Menghadiri <i>Walimatul ‘Urusy</i>	31
	C. Pengertian Sanksi	33
	D. Tujuan Sanksi.....	34
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PELANGGARAN ADAT WALIMATUL ‘URUSY PADA SUKU MELAYU	
	A. Proses <i>Walimatul ‘urusy</i>	36
	B. Macam-Macam Pelanggaran Adat terhadap Pelaksanaan <i>Walimatul ‘urusy</i>	41
	C. Sanksi Adat Terhadap Pelaksanaan <i>walimatul‘ urusy</i>	45
	D. Proses Sanksi adat Terhadap Pelaksanaan <i>Walimatul ‘urusy</i>	48
	E. Tinjauan Hukum Islam tentang sanksi adat terhadap pelaksanaan <i>walimatul ‘urusy</i>	52
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	
	A. Kesimpulan	558
	B. Saran-Saran	60
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	61
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Rantau Baru merupakan suatu daerah yang berada dalam kawasan Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Desa ini berjarak \pm 37 Km dari Ibu kota Kabupaten Pelalawan, mempunyai latar belakang sejarah yang sama, karena berasal dari rumpun Melayu. Namun dalam hal adat istiadat, budaya dan agama sudah terjadi banyak perbedaan. Karena disebabkan oleh salah satu desa yang terisolir, terlebih lagi karena Pelalawan ini merupakan Ibu kota Kabupaten memiliki penduduk yang heterogen.¹

Masyarakat Rantau Baru mayoritasnya bersuku Melayu, yang dimana dalam suku Melayu ini dipecah dan dibagi menjadi tiga bagian yaitu suku Melayu Tua, suku Melayu muda dan suku melayu mandailing yang berprofesi sehari-hari sebagai nelayan. Dimana telah kita ketahui bahwasanya suku Melayu sangat identik sekali dengan agama Islam, maka secara otomatis penduduk desa Rantau Baru mayoritas beragama Islam. Kehidupan masyarakatnya dapat dikatakan agamis dan juga masih kuat memegang adat istiadat.

Semangat keagamaan masyarakatnya yang masih cukup tinggi ini terbukti dengandibangun mesjid, mushalla atau surau. Tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa kurangnya antusias masyarakat dalam mengindahkan masjid dan mushalla

¹ M. Syahir, (Kepala Desa), di Desa Rantau Baru, *Wawancara*, 17 Januari 2011.

yang ada dengan cara melaksanakan shalat berjama'ah dan merawat kebersihan lingkungan masjid.²

Di samping pernikahan ,*walimatul 'urusy* atau resepsi pernikahan juga sunnah Rasulnya. Sunnah Rasul yang berarti suatu tradisi yang telah dicontohkan oleh Rasul untuk dirinya dan untuk umatnya.

Dalam Islam *Walimatul 'urusy* adalah suatu cara atau pencetusan tanda gembira serta pemberitahuan kepada sanak saudara dan khalayak masyarakat banyak bahwa seseorang telah melaksanakan suatu pernikahan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga.³ Sabda Nabi Saw:

انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَارَسُولُ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ أَمْرَةً عَلَى وَجْتِ نَوَاةٍ مِنْ دَهَبٍ قُلِّ بَرَكٌ

Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw melihat kemuka Abdul Rahman Bin 'Auf yang masih ada bekas kuning, berkata Nabi: “ Ada apa ini?, Abdul Rahman berkata: Saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya 5 dirham ”. Nabi bersabda: “ Semoga Allah memberkatimu. Adakanlah perhelaaan waluupun hanya dengan memotong seekor kambing”. (HR Mutafaqun 'Alaih).⁴

Disyari'atkan *walimatull 'urusy* dalam Islam bagi yang mampu adalah guna untuk memberi tahu atau menghabarkan kepada keluarga, tetangga dan masyarakat bahwa seseorang telah melaksanakan suatu pernikahan.

²Husein , (Tokoh Agama), di Desa Rantau Baru tanggal Wawancara, 17 Januari 2011.

³Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*,(Jakarta: Kencana, , 2003), h. 117.

⁴ Imam Malik, *Al-Muwaththa' Imam Malik*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 758

Di samping itu dalam pelaksanaan *walimatul 'urusy* ada beberapa hal yang dilarang berlebih-lebihan dalam pelaksanaannya, seperti yang terjadi pada zaman sekarang, misalnya dengan menyembelih banyak hewan kambing, sapi, kerbau atau unta dan lain sebagainya, serta banyak menyediakan makanan untuk bermewah-mewahan dan berlebih-lebihan, padahal itu tidak termakan semuanya. Akhirnya makanan-makanan tersebut dibuang di tempat-tempat sampah. Ini termasuk yang dilarang syari'at Islam.

Kemudian orang yang mengundang untuk walimah jangan sampai melupakan kerabat dan rekan-rekannya. Jika yang diundang hanya sebahagian diantara mereka, tentu akan menyakiti sebahagian yang tidak diundang. Undangan juga tidak boleh dikhususkan, yang pasti orang-orang shaleh diundang apakah mereka fakir atau kaya. Begitu juga bagi orang yang diundangpun wajib memenuhi undangan, kecuali ada alasan yang syar'i sehingga memberatkan ia untuk hadir.⁵ Seperti sabda Nabi :

نُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَيْءُ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا إِلَّا غَنِيَاءٌ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدُّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

Abu Hurairah pernah berkata Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang diundang kesana hanya orang-orang yang kaya, sedangkan orang-orang miskin tidak bisa mendatangnya, siapa yang tidak memenuhi undangan, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya “.⁶

⁵Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta Selatan: Pustaka Al-Kausar, , 2009), h. 133

⁶ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta, Gema Insani, 2002), Jilid 3, Cet. 1

Sehubungan dengan itu, di Desa Rantau Baru terjadi tradisisanksi pelanggaran adat terhadap pelaksanaan walimatul 'urusy. Pelanggaran walimatull 'urusy ialah jika seseorang keluarga yang akan melaksanakan atau melangsungkan suatu resepsi pernikahan dimana dalam pelaksanaan ini mereka tidak meminta izin atau memberi tahu ninik mamak, Datuk Sati, selaku orang tertua atau pemucuk adat Ketua Simondo, Ketua Anak Jantan dan masyarakat setempat, maka disini ninik mamak atau Datuk Sati bisa dengan spontan melarang atau memberhentikan resepsi pernikahan tersebut dan memberikan sanksi terhadap keluarga yang melaksanakan resepsi tersebut. Serta ada beberapa adat lain yang harus diperhatikan dan dilakukan serta tidak boleh dilanggar atau diabaikan seperti Memasang Tonggol (bendera adat/umbul-umbul), menyerahkan rumah kepada ketua Simondo, guna melakukan penataan serta hiasan dalam rumah, dan apabila hal seperti ini tidak dilakukan atau dilanggar maka akan dikenakan denda atau sanksi adat.

Beberapa adat yang tidak boleh dilanggar dalam pelaksanaan walimatul 'urusy antara lain:

1. Harus memberi tahu terlebih dahulu, meminta izin kepada Ninik Mamak, Datok Sati selaku pemucuk adat, Ketua Simondo, Ketua Anak Jantan sebelum melangsungkan walimatul 'urusy.
2. Penyerahan rumah kepada Ketua Simondo.
3. Nikah sasuku

4. Memasang Tonggol (bendera/umbul-umbul) tidak boleh tumbang atau tercabut.⁷

Ujang pelaku yang tidak mengikuti adat dalam pelaksanaan walimah, ia tidak meminta izin atau melapor kepada Ninik Mamak yaitu Datok Sati selaku pemucuk Adat, ketua Simondo, dan Ketua Suku Anak Jantan. Alasannya adalah pada waktu itu ia telah sah menikah secara agama dan tercatat dipemerintah. Dan hal yang patalnya ialah ia melanggar adat yang tidak boleh menikah sesuku, Dan ia pun dijatuhi sanksi menjadi 2 kali lipat yaitu dengan membayar uang adat dan 1 seekor kerbau, karena tidak terpenuhinya sanksi, dan ia pun tidak bisa melangsungkan pernikahan dan selamatan atau *walimatul 'urusy* dikampungnya tepatnya di Desa Rantau Baru. Maka ia hanya melaksanakan nikah saja di daerah pangkalan kerinci tepatnya di jalan cempaka dan tidak melaksanakan walimah karena keterbatasan ekonomi.⁸ Begitu juga dengan Marjoni 39 tahun ia juga pernah melanggar adat dalam pelaksanaan walimahnya hal ini terjadi sekitar tahun 2009 adapun pelanggaranya ia memasang Tonggol yang tidak kokoh sehingga berakibat tumbang atau terjatuh Tonggol tersebut hal ini dikarnakan kurangnya perhatian terhadap apa-apa yang telah dijelaskan oleh ninik mamak sehingga terabaikan dikarnakan kesibukan hari pestanya, dan ia dikenakan sanksi adat dengan denda seekor Kambing. Adapun cara pelaksanaan sanksinya, apa bila si pelaku telah melanggar adat maka Ninik Mamak atau Datuk Sati langsung memberi teguran kepada sipelaku bahwa ia telah melanggar adat dalam

⁷M. Ali, (Tokohadat), Desa Rantau Baru, *Wawancara*, Tanggal 10 Februari 2011.

⁸Ujang, (salah seorang terkena sanksi pelanggaran adat), Desa Rantau Baru, *Wawancara*, tanggal 10 Febuari 2011

pelaksanaan *walimatul urusy*' dan jika dalam musyawarah dapat diputuskan sesuai dengan kesalahan, maka langsung diberikan denda. Dalam pembayaran sanksi tersebut Ninik Mamak atau Datuk Sati juga harus mendatangkan saksi, serta mengundang kepala desa sebagai pemerintah tertinggi di Desa tersebut. Yang harus jugaturut ikut sertakan dalam penyelesaian adat pada pelaksanaan walimah, setelah itu maka orang yang melanggar adat tersebut membayar sanksi atau denda adat. Adapun sanksi tersebut (sapi, kambing) dipotong dan dimasak di rumah sipelaku, setelah itu sipelaku mengundang seluruh perangkat Ninik Mamak dan perangkat Desa serta masyarakat untuk makan bersama.⁹

Disamping itu ada juga seorang warga bernama Wardi atau kerap disapa kuri, sekarang berusia 37th ia menuturkan bahwasanya pernah menikah tetapi istri pertamanya meninggal dikarnakan sakit kanker, setelah istrinya meninggal, Wardi pun menikah lagi dengan seorang janda pada tanggal 3 februari 2008, pada saat itu dia ingin melaksanakan *walimatul 'urusy* dengan sederhana tanpa harus diketahui orang banyak, dan ia pun tidak ada melaksanakan rapat atau melapor dengan penegak atau pemucuk adat, karna hal ini dianggapnya walimah yang tidak besar besaran dikarnakan keterbatasan ekonomi dan hal ini pun perkawinanya yang kedua kali bagi dirinya serta perkawinan ini sudah sah secara agama dan negara, tetapi dimata adat namanya perkawinan atau melaksanakan walimah atau selamat itu tetap menjadi salah satu kewajiban para pemuka adat atau ninik mamak untuk mengawasi dan mengetahui, maka pada saat itu malam selasa datok sati serta perangkat bersilahturahmi mendatangi rumah wardi, setelah

⁹Marjoni, warga (salah seorang terkena sanksi pelanggaran adat), Desa Rantau Baru, Wawancara, tanggal 8 maret 2011

itu datok sati melalui ketua simondo meminta penjelasan kepada tuan rumah tentang adanya pelaksanaan walimah di rumah wardi, dengan tidak adanya melaksanakan rapat permohonan izin ingin melaksanakan *walimah* kepada datok sati, maka hal ini dianggap oleh datok sati melanggar ketentuan adat yang sudah berlaku dari nenek moyang mereka. Maka wardi di kenakan sanksi membayar seekor kerbau, tetapi disamping itu wardi tidak bisa membayar denda tersebut karena keterbatasan ekonomi, karena ia hanya seorang nelayan. Disamping itu datok sati tidak bisa memberikan izin untuk melaksanakan walimah di desa rantau baru, karena hal seperti ini adalah adat yang tidak boleh dirubah atau dilanggar. *Di injak layu diubah mati*, maksudnya hukum adat yang ada tidak bisa dirubah. Suardi pun diasingkan dari kampung, Maka dengan itu Wardi berinisiatif untuk melaksanakan walimah atau selamatan ditempat lain yakni ditempat mempelai wanita yang berada diluar desa Rantau Baru.¹⁰

Adapun ketentuan adat seperti di jelaskan diatas sekarang ini dilanggar oleh masyarakat Rantau Baru yang dimana disebabkan karena adanya hal-hal yang mendesak dalam pelaksanaan resepsi pernikahan. Sehingga dengan pelanggaran tersebut mendapatkan sanksi adat.

Adapun sanksi adatnya sebagai berikut:

1. Membayar denda seekor kerbau.
2. Membayar seekor kambing
3. Dikucilkan dari tengah-tengah masyarakat.

¹⁰Wardi. Warga (salah seorang yang terkena sanksi adat), di Desa Rantau Baru, wawancara, 8 maret 2011

4. Diasingkan dari kampung.
5. *Walimatull 'urus* tidak boleh dilaksanakan atau tidak bisa dilanjutkan sebelum adanya pembayaran sanksi¹¹

Dengan adanya sanksi adat tersebut, maka menimbulkan dampak negatif, antara lain :

1. Keluarga yang melangsungkan resepsi pernikahan merasa malu
2. Adanya sebahagian orang tuanya menjual tambak ikan, lahan perkebunan bahkan berhutang demi memenuhi sanksi yang diberikan.

Dari adanya aturan adat dan sanksi adat seperti ini sebahagian masyarakat seperti kuri, dedi, dini, iro, caca, santi, sarifah dan banyak lagi lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, mereka berpendapat bahwa hal seperti ini memberatkan mereka, yang seharusnya mereka bisa menikah dan melangsungkan walimah, menjadi tidak bisa dikarenakan tidak boleh nikah sesuku, harus meminta izin dan memberi tahu datok sate terlebih dahulu, hanya sedikit saja masyarakat di Desa yang setuju dengan ketentuan adat terutama orang-orang tua yang sudah terlanjur memegang teguh adat yang sudah ada.¹²

Demikianlah uraian tentang sanksi adat terhadap pelanggaran *walimatul 'urus*. Ternyata didalam Islam tidak ada ketentuan membayar saksi seperti yang telah dijelaskan di atas dan memberhentikan terhadap pelaksanaan *walimatul*

¹¹ Abdul Somad Ja'far (53), (Pemuka Adat), di Desa Rantau Baru, *Wawancara*, 7 april 2011.

¹² Dini (masyarakat), di Desa Rantau Baru, *Wawancara*, 7 april 2011.

'*urusy* tersebut. Disini penulis melihat adanya kejanggalan antara adat desa Rantau Baru dengan hukum Islam. Berdasarkan fenomena dan fakta-fakta yang terjadi tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai *walimatul 'urusy* itu sendiri dengan judul **“Sanksi Pelanggaran Adat Terhadap Pelaksanaan Walimatul 'Urusy Pada Suku Melayu (Study Kasus di Desa Rantau Baru Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan) “ Dalam Tinjauan Hukum Islam.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi pembahasan ini tentang pelanggaran adat dan Sanksi Pelanggaran Adat Terhadap Pelaksanaan *Walimatul 'urusy* yang ada di Desa Rantau Baru Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan dalam tinjauan hukum islam

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apa saja yang termasuk dalam pelanggaran Adat terhadap pelaksanaan *walimatul 'urusy* di Desa Rantau baru?
- b. Bagaimana sanksi adat terhadap pelaku pelanggaran pelaksanaan *walimatull 'urusy* di Desa Rantau Baru?
- c. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi pelanggaran adat pada pelaksanaan *walimatul 'urusy*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja bentuk pelanggaran adat dalam pelaksanaan *walimatul 'urusy*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sanksi adat terhadap pelaku pelanggaran adat pada pelaksanaan *walimatul 'urusy*.
- c. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi pelanggaran adat dalam pelaksanaan *walimatul 'urusy*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis tentang pelanggaran adat dalam pelaksanaan *walimatul 'urusy* tersebut.
- b. Sebagai informasi dan sumbangan bagi akademik, masyarakat, pemerintah dan pembaca lainnya
- c. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata 1 (satu) pada Fakultas Syari'ah UIN SUSKA RIAU.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Rantau Baru Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Pertimbangan, mengambil lokasi ini menjadi tempat penelitian, karena di Desa ini, adanya sanksi pelanggaran adat terhadap pelaksanaan *walimatul urusy*' dan hal ini dilanggar oleh masyarakat setempat. Mungkin ditempat-tempat lain juga banyak terjadi, tetapi dengan adanya permasalahan yang terjadi di desa ini bisa mnjadikan

solusi atau perwakilan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ditempat-tempat lain.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah pemuka adat, pemuka Agama serta pihak-pihak yang melanggar adat dalam pelaksanaan *walimatul ursy*' di Desa Rantau Baru
- b. Objeknya adalah sanksi pelanggaran adat terhadap pelaksanaan *walimatul ursy*' menurut Hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh ninik mamak yang berjumlah 15 orang dan diambil 13 orang ini dijadikan sampel. Kemudian ditambahkan orang yang melanggar sebanyak 3 kasus atau 6 orang. Populasi ini dijadikan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik *total sampling*.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh adat dan responden yaitu orang yang pernah mendapat sanksi secara adat terhadap pelanggaran pelaksanaan *walimatul ursy*' secara langsung.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan sumber-sumber yang berhubungan dengan *walimatul ursy*.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Observasi, yaitu penulis langsung turun kelokasi penelitian untuk melakukan pengamatan secara dekat mengenai masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden.

6. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif yaitu setelah data-data terkumpul, data-data tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut, kemudian data-data tersebut dihubungkan antara satu dengan yang lain. Sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Setelah data-data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendiskrifsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan data-data umum yang ada kaitanya dengan maslah yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus
- b. Induktif, yaitu data-data yang ada hubunganya dengan masalah yang diteliti yang selanjutnya diambil kesimpulan secara umum

- c. Deskriptif, yaitu dengan cara mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, kemudian dianalisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, penulis memaparkan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran umum lokasi penelitian terdiri dari geografis dan demografis, mata pencaharian, pendidikan, agama dan sosial budaya Desa Rantau Baru.

Bab III : Memaparkan tinjauan umum tentang pengertian walimatul ursy' dan sanksi, hukum mengadakan walimatul ursy', macam-macam hukuman dan tujuan hukuman.

Bab IV : Merupakan bab tentang analisis hukum Islam, tentang latar belakang sanksi pelanggaran adat terhadap pelaksanaan walimatul ursy' di desa Rantau Baru, dan Tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi pelanggaran adat terhadap pelaksanaan walimatul ursy' itu sendiri

Bab V : Bab ini merupakan bab yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan sebelumnya disertai beberapa saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis dan Demografis

1. Geografis Daerah

Desa Rantau Baru merupakan suatu daerah yang berada dalam kawasan Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Desa ini berjarak \pm 37 Km dari Ibu kota Kabupaten Pelalawan, mempunyai latar belakang sejarah yang sama, karena berasal dari rumpun Melayu. Namun dalam hal adat istiadat, budaya dan agama sudah terjadi banyak perbedaan. Karena disebabkan oleh salah satu desa yang terisolir, terlebih lagi karena Pelalawan ini merupakan Ibu kota Kabupaten memiliki penduduk yang heterogen.¹

Masyarakat Rantau Baru mayoritasnya bersuku Melayu, yang dimana dalam suku Melayu ini dipecah dan dibagi menjadi tiga bagian yaitu suku Melayu Tua, suku Melayu muda dan suku melayu mandailing yang berprofesi sehari-hari sebagai nelayan. Dimana telah kita ketahui bahwasanya suku Melayu sangat identik sekali dengan adat istiadat dan agama Islam, maka secara otomatis penduduk desa Rantau Baru mayoritas beragama Islam. Kehidupan masyarakatnya dapat dikatakan agamis dan juga masih kuat memegang adat istiadat. Desa Rantau Baru juga merupakan salah satu desa yang berada pada wilayah pesisir pantai, Desa ini merupakan daerah penghasil ikan sebagaimana daerah lainya. Desa ini merupakan daratan rendah, daerah ini memiliki iklim tropis dan memiliki

¹ Sumber Data: Kantor Desa Rantau Baru Tahun 2011

pergantian musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, sedangkan curah hujan rata-rata pertahun di daerah ini adalah 2593 mm.

Desa Rantau Baru mempunyai luas wilayah 3025 Ha, sebagian wilayah telah dipergunakan untuk perumahan atau pemukiman penduduk dan perkebunan. Sedangkan ketinggian dari permukaan sungai diperkirakan 2 m, suhu rata-rata adalah 21-33°C, bahkan pada hari-hari tertentu bisa mencapai 35°C. Sebagian wilayah Pemerintah, desa Rantau Baru mempunyai batas-batas wilayah tertentu dengan wilayah lain di sekitarnya².

Adapun wilayah tersebut berbatasan dengan:

- Sebelah timur dengan Desa Kuala Terusan
- Sebelah utara dengan Desa Mekar Jaya
- Sebelah selatan dengan Kecamatan Langgam
- Sebelah barat dengan kecamatan Pangkalan Kuras

2. Demografis Daerah

Berdasarkan data demografi desa Rantau Baru menurut data terakhir yaitu pada tahun 2011, populasi penduduk desa Rantau Baru berjumlah 956 jiwa dengan rincian 505 orang laki-laki dan 451 perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 450 jiwa yang tersebar di beberapa RT dan RW³.

Penduduk merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam suatu wilayah, oleh karena itulah maka proses perkembangan penduduk merupakan

²Sumber Data: Kantor Desa Rantau Baru Tahun 2011

³*Ibid.*

modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa, dengan demikian penduduk adalah investasi yang sangat menentukan terhadap kemajuan pembangunan.

Tabel di bawah menunjukkan keadaan penduduk desa Rantau Baru berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2011⁴.

TABEL I.
JUMLAH PENDUDUK DESA RANTAU BARU
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	JENIS KELAMIN	PREKUENSI	PERSENTASE
1	Laki-Laki	505	52,82%
2	Perempuan	451	47,18%
	JUMLAH	956	100%

Sumber Data: Kantor Desa Rantau Baru Tahun 2011

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Rantau Baru berdasarkan jenis kelamin laki-laki terlihat lebih besar dari pada jumlah penduduk jenis kelamin perempuan. Di tabel 1. diatas tercatat bahwa jenis kelamin laki-laki berjumlah 505 jiwa dengan persentase 52,82% (persen), dan jenis kelamin perempuan berjumlah 451 jiwa dengan persentase 47,18% (persen).

Disamping itu dengan banyaknya jumlah penduduk dan persentase penduduk Desa Rantau Baru Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan, pada kenyataanya di desa Rantau Baru hanya terdapat suku asli dan tidak banyak pendatang yang tinggal di desa tersebut.

⁴*Ibid.*

Adapun faktor penyebab tidak banyaknya suku pendatang yang berdomisili di desa Rantau Baru karena daerah ini pada faktanya merupakan daerah yang terisolir, dan sering terjadi banjir, lahan yang ada di desa ini sangatlah potensial untuk berkebun namun di sebabkan SDM yang kurang sehingga masyarakat desa ini tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada. Perkembangan sekarang di desa Rantau Baru telah dimulai perkebunan sawit, dan kayu tetapi hanya beberapa orang saja.

Disamping itu dalam rangka mengetahui kehidupan masyarakat Desa Rantau Baru dalam menyambung kehidupan dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II
PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

No	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	4
2	Nelayan	723
3	Petani	35
	JUMLAH	762

Sumber Data: Kantor Desa Rantau Baru Tahun 2011

Dapat dicermati bahwa sesuai dengan letak geografi dan demografinya, mata pencaharian masyarakat Desa Rantau Baru secara dominan adalah sebagai nelayan.

Disamping itu jumlah penduduk Desa Rantau Baru pada Umumnya banyak penduduk masyarakat yang berdomisili bersuku asli di daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL III
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN SUKU BANGSA

NO	JENIS SUKU	PREKUENSI	PERSENTASE
1	Melayu	947	99,06%
2	Jawa	5	0,53%
3	Minang	4	0,41%
	JUMLAH	956	100%

Sumber Data: Kantor Desa Rantau Baru Tahun 2011

Dari tabel di atas terlihat bahwa mayoritas suku bangsa yang berdomosili di Desa Rantau Baru adalah suku Melayu dengan jumlah penduduk sebesar 947 jiwa dengan persentase 99,06% (persen), selanjutnya suku Jawa dengan jumlah penduduk 5 jiwa dengan persentase 0,53% (persen), sementara suku bangsa yang minoritas di daerah ini adalah suku Minang dengan jumlah penduduk 4 jiwa dengan persentase 0,31% (persen).

B. Kehidupan Beragama dan Pendidikan

1. Kehidupan Beragama

Memeluk agama merupakan hak asasi manusia. Kebebasan beragama di Negara Republik Indonesia dijamin dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 29 yang berbunyi, ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan untuk beragama dan tidak mencampurkan kepercayaan⁵.

Masyarakat Desa Rantau Baru merupakan masyarakat yang memiliki keyakinan (masyarakat yang beragama). Meskipun faktanya di tengah interaksi sosial di masyarakat ditemukan berbagai keyakinan agama ada. Minimal hal ini sudah merupakan bentuk keselarasan atau sesuainya dengan fitrah dan kodrat dari manusia.

Adapun keyakinan (agama) yang terdapat di Desa rantau Baru hanya satu yaitu agama islam. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

TABEL IV
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENGANUT AGAMA

NO	AGAMA	PREKUENSI	PERSENTASE
1	Islam	956	100%
2	Kristen	-	
3	Hindu	-	
4	Budha	-	

⁵Lihat UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2.

	JUMLAH	956	100%
--	---------------	------------	-------------

Sumber Data: Kantor Desa Rantau Baru Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas penduduk berdasarkan penganut agama/keyakinan pada agama islam walaupun suku Jawa atau Minang seluruhnya memeluk agama islam, akan tetapi dalam pelaksanaan ibadah masyarakat di Rantau Baru lebih mengacu kepada pelaksanaan yang ada umumnya ada, pada masyarakat muslim indonesia seperti pelaksanaan meniga hari, yasinan, peringatan maulid Nabi.

Selain itu, suasana kehidupan homogen yang ada di Desa Rantau Baru disebabkan kurangnya masyarakat luar yang berdomisili di Desa Rantau Baru sehingga masyarakat dalam pengamalan ibadahnya mengikuti kepada apa yang telah dilaksanakan biasanya di kampung, jikalau terjadi sebuah perubahan yang bertentangan dalam pelaksanaan ibadah maka akan timbul gejolak serta penolakan dari tokoh agama, tokoh adat di Desa Rantau Baru.

Dari beberapa keyakinan (agama) di Desa Rantau Baru, ternyata islam merupakan agama yang mayoritas diyakini oleh masyarakat tersebut.

Di samping itu, untuk melihat dan mengukur hidupnya suasana beragama di tengah-tengah masyarakat, maka yang harus di perhatikan adalah sejauh tingkat kemakmuran sarana ibadah yang ada. Oleh karena itu, peneliti dalam tulisan ini akan menampilkan sarana-sarana ibadah yang terdapat di Desa rantau Baru Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan tabel di bawah ini:

TABEL V
JUMLAH SARANA IBADAH

NO	DESA	SARANA IBADAH			
		MESJID	SURAU	GEREJA	KLENTENG
1	Rantau Baru	1	2	-	-
	JUMLAH	1	2	-	-

Sumber Data: Kantor Desa Rantau Baru Tahun 2011

Dari tabel di atas terlihat sarana ibadah yang terdapat di Desa Rantau Baru hanya berjumlah 3 Buah yang terdiri dari 1 masjid 2 mushalla. Adapun sarana ibadah berupa mushalla yang ada tidak seaktif di masjid kadang-kadang buka kadangkala tidak, ini juga menimbulkan kekeliruan karena semestinya mushalla tersebut dapat aktif baik untuk dipergunakan beribadah, wirid dan sebagainya. Terkadang masjid pun dihari-hari biasa sering tidak di isi dengan sholat berjamaah, dikarenakan masyarakat bahkan imam masjid pun sibuk dengan aktivitas mencari ikan sebagai nelayan, kecuali di hari besar islam saja barulah masjid dipergunakan. Hal ini disebabkan kurangnya kepedulian para ulama, ustadz dan ormas islam di desa tersebut pun boleh dikatakan kurang, berbicara tentang ormas di Desa Rantau Baru ini tidak ada satupun ormas islam yang berdiri.

Disamping itu, Tempat ibadah yang terdapat di kawasan tersebut hanyalah masjid dan surau saja. Hal ini mengindikasikan sebagian besar masyarakat di kawasan Desa Rantau Baru beragama Islam.

2. Kondisi Pendidikan

Dalam suatu masyarakat tingkat pendidikan yang dimiliki sangat menentukan terhadap lajunya arus perkembangan pembangunan yang dilakukan. Dengan tingkat pendidikan yang memadai dari individu akan menambah sumber daya manusia yang berkualitas, karena sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam proses pembangunan selain sumber daya alam.

Tingkat pendidikan juga memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi. Apalagi dalam masa pembangunan sekarang ini menuju ke arah industrialisasi jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai kemampuan atau paling tidak dapat membaca dan menulis. Adapun kemajuan pendidikan dapat diukur dari banyaknya penduduk yang memperoleh dan menuntaskan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Akan tetapi, kemajuan pendidikan salah satunya dipengaruhi oleh berdirinya sarana pendidikan yang memadai. Hal ini tidak terlepas dari peranan masyarakat dalam mendukung dan mensukseskan dunia pendidikan. Adapun peran pemerintah dalam mendukung dan mensukseskan dunia pendidikan dapat dilakukan dengan cara, adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS).
2. Memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi dan tidak mampu.
3. Memberikan penghargaan dan insentif yang layak dan mencukupi kepada tenaga pengajar.
4. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan cara memberikan training dan pembelajaran praktis agar pendidik memiliki pemahaman luas dan

ilmu sehingga tenaga pengajar siap dan memiliki percaya diri dan intelektual dalam mendidik dan memberikan ilmu kepada peserta didik.

Jika dilihat faktanya dilapangan, maka sarana pendidikan yang didirikan baik berstatus swasta yang merupakan komitmen masyarakat atau individu terhadap dunia pendidikan maupun yang berstatus negeri yang merupakan naungan pemerintah. Adapun fasilitas pendidikan yang tersedia di Desa Rantau Baru terdiri dari SD,danMI/MDA⁶.

TABEL VI
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH SISWA
1	SD	1 Buah	133 Siswa
2	MI/MDA	1 Buah	82 Siswa
	JUMLAH	2 Buah	215 siswa

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Rantau Baru Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan jumlahnya relatif sedikit namun untuk melanjutkan ke tingkat SLTP dan SMU mereka meski harus langsung ke Ibu Kota dan jarak tempuhnya sekitar \pm 37 Km. Kondisi jarak yang jauh ini tidak membuat mereka surut dan berputus asa dalam menimba ilmu yang telah pemerintah terapkan dengan kebijakan mengenai wajib belajar sembilan tahun demi menyongsong masa depan yang lebih baik, tetapi hal itu juga terkadang banyak terhenti untuk melanjutkan sekolah menengah beralih dengan

⁶*Ibid.*

alasan jarak yang jauh, keadaan jalan Desa menuju Kota yang kerap banjir, transportasi tidak memadai dan ketidak sanggupan karena masala ekonomi.

Tetapi mulai dari sekarang semoga pemerintah atau pihak terkait agar dapat lebih memperhatikan peserta didik yang dapat membantu mereka dalam melanjutkan pendidikan yang lebih baik dan hingga saat ini sudah banyak dari anak-anak Desa Rantau Baru yang melanjutkan ke sekolah menengah dan perguruan tinggi.

C. Adat Istiadat

Berdasarkan kondisi sosial masyarakat di Desa Rantau Baru Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang homogen dan didiami oleh warga asli desa sendiri maka dalam pergaulan masyarakat sendiri sangat menjunjung nilai-nilai adat yang ada di masyarakat.

Adapun di masyarakat Desa Rantau Baru Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan terdiri dari suku-suku asli, yang semuanya sangat erat kaitan dan tanggung jawab kepada Ninik Mamak, datok Sati yang menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL VII
SUKU-SUKU DALAM ADAT

NO	JENIS SUKU	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Melayu Muda	356	37,58%
2	Melayu Tuo	324	35,41%
3	Melayu Mandailing	267	27,01%
	JUMLAH	947	100%

Sumber data: Abdul Somad Ja'far, Ninik Mamak, (Pemuka Adat)

Dari tabel di atas dapat diketahui suku-suku yang ada di Desa Rantau Baru yang paling terbanyak adalah suku Melayu Muda sebanyak 356 jiwa dengan persentase 37,58% (persen), kedua adalah suku Melayu Tuo sebanyak 324 jiwa dengan persentase 35,41% (persen), dan selanjutnya adalah suku Melayu Mandailing sebanyak 267 dengan persentase 27,01% (persen)

Disamping itu dalam penyelesaian permasalahan diselesaikan oleh Ninik mamak, namun jika Ninik mamak tidak berhasil menyelesaikan maka selanjutnya adalah yang paling tinggi yang diberi gelar dengan nama Datuk Sati yang turun untuk penyelesaian permasalahan yang ada. Dalam kehidupan masyarakat Desa Rantau Baru sangat beretika sesuai dengan adat yang berlaku, sehingga pelaksanaan apapun baik acara pernikahan, *walimatul 'urusy*, syukuran dan sebagainya tidak terlepas dari pantauan hubungan adat yang ada, sehingga tokoh adat sangat di hargai layaknya tokoh pemerintahan dan tokoh agama, karena ketiga ini adalah disebut "*Tali Sapilin Tigo*" yang berarti tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan. Serta mentaati aturan syari'at dan aturan adat tertentu yang disebut "*adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah*", maksudnya (aturan adat seiring dengan syari'at islam dan kitabullah).⁷ Tetapi disini penulis melihat adanya ketidak sinambungan antara syari'at, pemerinta dan adat, dapat dilihat dari fakta kasus yang ada terjadi di Desa tersebut.

⁷M. Kabir, (ninik mamak melayu tuo), di Desa Rantau Baru, *Wawancara*, 11 Januari 2013

TABEL VIII
PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG SANKSI ADAT

NO	PENDAPAT	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Setuju	150	30 %
2	Tidak Setuju	250	40 %
3	Tidak tahu	150	30 %
	JUMLAH	550	100 %

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebahagian kecil masyarakat di Desa Rantau Baru yang menerima adanya sanksi adat tersebut yang berjumlah 150 jiwa dengan persentase 30% (persen), selanjutnya tidak setuju berjumlah 250 jiwa dengan persentase 40% (persen) sementara yang tidak mengetahui dengan jumlah penduduk 150 jiwa dengan persentase 30% (persen)

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WALIMATUL ‘URUSYDANSANKSI

A. Pengertian Walimatul ‘Urusy

Walimah(الوليمة)berarti penyajian makanan untuk acara pesta.Ada juga yang mengatakan, *walimah* berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau lainnya¹.Sedangkan dalam kamus bahasa Arab *walimatul ‘urusy* berarti pesta perkawinan².

Adapun asal kata *walimah* adalah sempurnanya sesuatu dan berkumpulnya sesuatu.Dalam bahasa Arab dikatakan *aulamarrajulu*, jika akal dan akhlaknya bersatu. Kemudian makna ini diadopsi untuk nama makanan dan hidangan pengantin yang diadakan karena adanya pernikahan seorang laki-laki dan wanita. Maka dari itu *walimah* tidak pernah dipakai kecuali untuk hidangan pengantin³.

Al-Azhari sebagaimana yang ditulis oleh Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Wanita* mengemukakan, kata *alwalimah* itu diambil dari kata *aulama* yang merupakan jamak, karena adanya dua orang yang sedang bertemu. Ibnu Arabi sebagaimana yang ditulis oleh Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Wanita* juga menyebutkan, kata itu pada dasarnya

¹ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, terjemah, 1998), h. 478.

²Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 260.

³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani & Budiman, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. 1, h. 678.

berarti kesempurnaan dan persatuan sesuatu yang berlangsung di suatu tempat yang banyak makanan untuk memperoleh kebahagiaan.⁴

Walimah juga diartikan sebagai makanan dalam perkawinan, berasal dari kata *walam*, yaitu mengumpulkan, karena suami istri berkumpul. Imam Syafi'i dan sahabatnya berkata bahwa *walimah* itu berlaku pada setiap undangan yang diadakan karena kegembiraan yang terjadi⁵. *Walimatul 'urusy* juga dikatakan sebagai perhelatan atau kenduri yang dilaksanakan dalam rangka perkawinan⁶.

B. Pendapat Ulama tentang Walimatul 'Urusy

1. Hukum dan Dasar Hukum Walimatul 'Urusy

Agama menganjurkan kepada orang yang melaksanakan perkawinannya mengadakan *walimah*, tetapi tidak memberikan bentuk minimum ataupun bentuk maksimum dari *walimah* itu. Hal ini memberikan isyarat bahwa *walimah* itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan mengingat agar dalam pelaksanaan *walimah* itu tidak ada keborosan, kemubaziran lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri⁷.

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walimah* itu hukumnya sunnat mu'akkad⁸. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah S.a.w. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu:

⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 131.

⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, Penerjemah Syaifuddin Anwar & Misbah Mustafa, (Surabaya: Bina Iman, 2007), Buku 2, h. 144.

⁶Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 108.

⁷*Ibid*, h. 109.

⁸ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka setia, 1999), h. 149.

: يت رسول الله صلى الله عليه وسلم اولم على شيء
من نسائه ما ولم على زينب , ف نه ذبح شاة . (رواه البخارى و مسلم)

“Dari Anas bin Malik, ia berkata,”Aku tidak pernah melihat (tidak mengetahui) Rasulullah s.a.w. membuat walimah atas sesuatu di antara istri-istri beliau sebagaimana beliau membuat walimah untuk Zainab, beliau hanya menyembelih seekor kambing”⁹.

Dan juga hadis Nabi s.a.w

عن صفية بنت شيبة قالت : اولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه
بمدن من شعير . (رواه البخارى)

“Syafiyyah binti Syaibah mengatakan, “Nabi s.a.w menyelenggarakan walimah ketika beliau menikahi salah seorang istrinya hanya dengan dua mud gandum”¹⁰.

Dari hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa *walimah* itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai dengan kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi s.a.w. bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan *walimah* oleh beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang¹¹.

2. Waktu Pelaksanaan *Walimatul ‘Urusy*

Dalam kitab *Fathul Baari*, sebagaimana yang dikutip oleh Syaikh Hasan Ayyub disebutkan bahwa para ulama *salaf* berbeda pendapat mengenai waktu *walimah*, apakah diadakan pada saat diselenggarakannya akad nikah atau

⁹Imam Muhammad bin Ismail Amir Yamin, *Subulussalam Syarh Bulughul Maram*, (Beirut: Dar-Fikr, 1991), Juz 3, h. 296.

¹⁰*Ibid.*, h. 301.

¹¹ Slamet Abidin, *op.cit.*, h. 151.

setelahnya. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat beberapa pendapat. Imam Nawawi menyebutkan, “Mereka berbeda pendapat, sehingga al-Qadhi Iyadh menceritakan bahwa yang paling benar menurut pendapat mazhab Maliki adalah disunnahkan diadakan *walimah* setelah pertemuan pengantin laki-laki dan perempuan di rumah. Sedangkan sekelompok ulama dari mereka berpendapat bahwa disunnahkan pada saat akad nikah. Sedangkan Ibnu Jundab berpendapat, disunnahkan pada saat akad dan setelah *dukhul* (bercampur). Dan yang dinukil dari praktik Rasulullah s.a.w adalah setelah *dukhul*¹².

3. Hukum Menghadiri *Walimatul ‘Urusy*

Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan menggembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang *walimah* wajib mendatanginya. Adapun wajibnya mandatangi undangan *walimah* apabila:

- a. Tidak ada uzur syar’i
- b. Dalam *walimah* itu tidak ada atau tidak digunakan untuk perbuatan munkar
- c. Yang diundang baik dari kalangan orang kaya maupun miskin¹³.

Adapun mengenai hukum menghadiri *walimah*, menurut Syafi’i, Hanbali dan Maliki adalah wajib berdasarkan hadis:

عن أبي هريرة رضي الله عنه , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأبأها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله (رواه البخاري ومسلم)

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi s.a.w bersabda, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah karena orang-orang yang layak untuk diundang tidak diundang (seperti orang miskin), dan orang yang

¹² Syaikh Hasan Ayyub, *op.cit.*, h. 100.

¹³ Slamet Abidin, *op.cit.*, h.152.

seharusnya tidak diundang malah diundang (orang yang kaya).Barang siapa yang tidak memenuhi undangan (tanpa udzur), maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya”¹⁴.

Dan sabda Rasulullah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دعي أحدكم فليجب , فإن كان صائماً فليصل , وإن كان مفطراً فليطعم (رواه مسلم و أحمد)

“Dari Abu Hurairah r.a dia berkata, “Rasulullah s.a.w pernah bersabda, ‘apabila salah seorang dari kamu diundang kesuatu walimah, maka hadirilah.Jika ia sedang berpuasa maka hendaklah ia mendoakan (kebaikan dan keberkahan), dan jika ia tidak berpuasa maka hendaklah ia makan makanan yang dihidangkan”¹⁵.

Dalam undangan *walimah* harus tidak ada yang menyebabkan orang lain terganggu karena kehadirannya karena orang tersebut tidak layak duduk bersama undangan lainnya. Jika orang semacam itu ada, maka para undangan lainnya boleh tidak hadir, misalnya mengundang orang-orang yang rendah akhlaknya sedangkan undangan lainnya terhormat¹⁶.

Harus dalam *walimah* itu tidak ada kemungkaran, seperti minum khamar.Jika yang tersebut itu ada, dilihat dulu. Kalau yang diundang itu termasuk orang yang apabila hadir dapat mencegah kemungkaran, maka hendaklah ia hadir mengabulkan undangan dan menghilangkan kemungkaran itu. Dan jika tidak, haram menghadirinya karena yang demikian itu berarti sama seperti orang yang merelakan dan mengakui kemungkaran¹⁷.

C. Pengertian *Sanksi*

¹⁴ Imam Muhammad bin Ismail amir Yamin, *op.cit.*, h. 298.

¹⁵ *Ibid.*, h. 299.

¹⁶ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *op.cit.*, h. 147.

¹⁷ *Ibid.*, h. 148.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, menurut WJS Poerwadarminta sanksi berarti tanggungan (tindakan, hukuman) yang dilakukan untuk memaksa seseorang menepati atau mentaati apa-apa yang sudah ditentukan.¹⁸

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu Rahmatan Lil 'Alamin, untuk memberi petunjuk dan pelajaran bagi manusia. Hukum ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tata tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah madharatkan kepada-Nya apabila manusia di muka bumi ini melakukan kejahatan dan tidak memberi mamfaat kepada Allah apabila manusia di muka bumi taat kepada-Nya.

Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari Al-Qur'an, Hadist, atau lembaga legeslatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus tertentu. Selain itu hukuman itu harus bersifat peribadi artinya hanya dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa seseorang tidak menanggung dosanya orang lain. Terakhir bahwa hukuman itu harus bersifat umum, maksudnya harus berlaku pada semua orang. karena manusia sama dihadapan hukum.¹⁹

D. Tujuan Sanksi

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam Syari'at Islam ialah pencegahan (دو الزجر لرا, *arraddu waz-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (الاصلاح والتهديب, *al-islah wat-tahzdib*).

¹⁸WJS poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 878

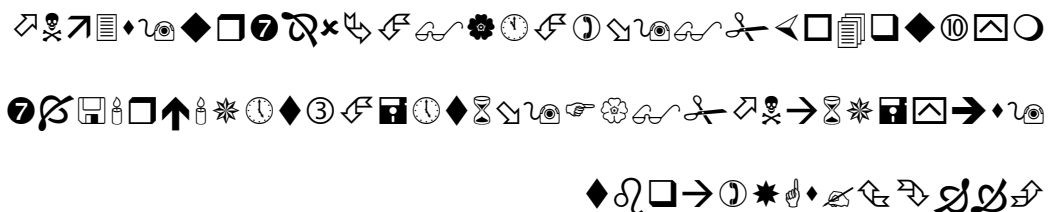
¹⁹A. Djazuli. *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 5

Pencegahan ialah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jarimah atau agar ia tidak terus-menerus memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pelaku agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikekanakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama. Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap. Yaitu menahan terhadap pelaku sendiri untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.²⁰

Selain itu Hudhari Bik dalam bukunya *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami*,²¹ menjelaskan. Pokok yang dipegangi oleh al-qur'an dalam hukuman (had) adalah :

a. Untuk kebaikan umat.

Firman Allah dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 179 tentang Qishaash.



Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu,
Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.²²

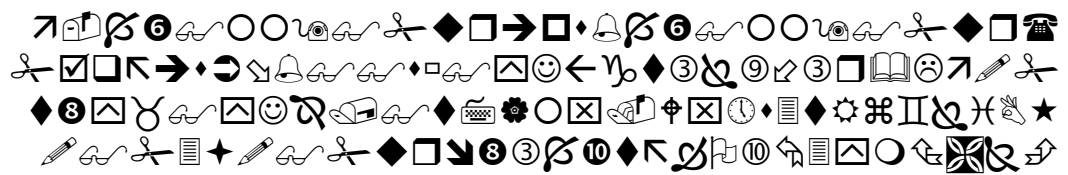
b. Mengekan pelaku pidana sehingga tidak mengulangi tindak pidananya.

Firman Allah dalam Al-qur'an surah Al-Maa'idah ayat 38 tentang pencuri.

²⁰A. Djazuli, *Ibid*, h. 40

²¹Hudhari Bik, *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islamy*, Alih Bahasa Mohammad Zuhri, (Semarang: Darul Ikhy Indonesia, 1980), h.240

²²Departemen Agama RI, *op. Cit* . h. 27



Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan

keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan

sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana.²³

²³Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 114

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PELANGGARAN ADAT WALIMATUL 'URUSY PADA SUKU MELAYU

Desa Rantau Baru adalah suatu desa yang memiliki masyarakat yang homogen dan memegang teguh adat istiadat yang sangat kental, dimana adat yang ada di Desa Rantau Baru ini menjadi tolak ukur dalam kehidupan sehari-hari liat saja dalam hal pernikahan, dimana sebelum pernikahan suku melayu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan tidak boleh dilanggar antara lain :

A. Proses Walimatul 'Urusy

Di dalam proses pelaksanaan walimatul 'urusy maka, harus diawali dengan proses peminangan dilakukan oleh ayah dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan yang disebut dengan *cicin tando tanyo*, selanjutnya jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak hal ini dinamakan *antar tando kete*', barulah terjadi pertunangan dengan memasang cincin emas di jari manis perempuan yang dipinang disebut juga dalam suku *antar tando godang*, setelah mengantar tando godang, maka terjadilah suatu perjanjian adat secara tidak tertulis yaitu apabila pihak laki-laki membatalkan pertunangan, maka cincin pertunangan menjadi hak wanita sepenuhnya, dan sebaliknya jika dari pihak wanita yang membatalkan, maka cincin pertunangan ditebus dua kali lipat besarnya kepada pihak laki-laki. Selanjutnya dalam proses peminangan ini terjadi *mengampuong*, maksudnya menetapkan hari, tanggal pernikahan dan mengumpulkan ninik mamak dari ketiga suku yang ada dibawah payung datuk

sati atau datuk batin sibokol-bokol.¹ Setelah adanya kesepakatan dalam menetapkan tanggal dan hari, maka dilanjutkan dengan pernikahan diawali dengan penyerahan rumah oleh pihak yang melangsungkan walimah kepada ketua simondodan selama pelaksanaan pernikahan sampai selesai walimah dalam mengatur segala ketentuan yang berkaitan dengan pakaian menjadi hak ketua simondo dan dibantu oleh ketua anak betino, pakaian yang dimaksud adalah seluruh hal-hal yang berkenaan dengan rumah dan pelaksanaan walimah. Adapun lafaz penyerahan oleh tuan rumah kepada ketua simondo, *rumah nan sabuah olek nan sapalago iko sorahan kepado simondo menyerah takkan bakaati baposan tak baiuik* dan diterima oleh ketua simondo dengan qobul, *mau begantung diakar lapuak bapijak ditebing otak menumpang dipewau bocor*.²

Disamping itu juga tidak lupa mengundang masyarakat maupun perangkat adat, apabila dalam masyarakat sukunya sama, maka yang mengundang harus dari suku yang sama hal ini berlaku pada masyarakat yang tidak memiliki jabatan atau pangkat dalam adat, tetapi jika yang diundang adalah orang yang memiliki jabatan dalam adat maka yang mengundang adalah ketua simondo. Dalam mengundang pinang, rokok, tembakau, korek, seperangkat tepak siri ini harus selalu ada tidak boleh hilang, jika hilang salah satunya maka datuk sati akan memberi sanksi atau denda. Selanjutnya setelah selesai mengundang, dilaksanakanlah akad nikah dan *walimatul 'urusy* hingga selesai. Setelah selesai maka ketua simondo dan ketua

¹Ibnu suib, (datuk sati), di Desa Rantau Baru, *Wawancara*, 13 Mei 2013

²Asli, (semondo), di Desa Rantau Baru, *Wawancara*, 13 Mei 2013

anak betino menyerahkan kembali rumah kepada pemiliknya yaitu orang yang melaksanakan *walimatul 'urusy*.³

Selanjutnya dalam pelaksanaan *walimatul 'urusy* Setelah melalui proses yang cukup panjang , dimulai dari *Merisik* hingga ke *Pertunangan*, dan *akad nikah* maka kemudian dilanjutkan dengan acara perkawinan. upacara perkawinan ini dianggap amat sakral bahkan tidak boleh ada satupun rangkaian prosesi adat yang terlewatkan. Berikut Prosesi Adat Melayu dalam pesta perkawinan pada umumnya :

Acara menggantung-gantung diadakan beberapa hari sebelum perkawinan atau persandingan dilakukan. Bentuk kegiatan dalam upacara ini biasanya disesuaikan dengan adat di masing-masing suku yang berkisar pada kegiatan menghiasi rumah atau tempat akan dilangsungkannya upacara pernikahan, memasang alat kelengkapan upacara, dan sebagainya. Yang termasuk dalam kegiatan ini adalah: membuat tenda dan dekorasi, menggantung perlengkapan pentas, menghiasi kamar tidur pengantin, serta menghiasi tempat bersanding kedua calon mempelai. Upacara ini menandakan bahwa budaya gotong-royong masih sangat kuat dalam tradisi Melayu. Upacara ini harus dilakukan secara teliti dan perlu disimak oleh orang-orang yang dituakan agar tidak terjadi salah pasang, salah letak, salah pakai, dan sebagainya. Ungkapan adat mengajarkan hal ini sebagai berikut: Adat orang berhelat jamu, Menggantung-gantung lebih dahulu, Menggantung mana yang patut, Memasang mana yang layak, Sesuai menurut alur

³*ibid*

patutnya, Sesuai menurut adat lembaga, Supaya helat memakai adat, Supaya kerja tak sia-sia. Supaya tidak tersalah pasang, Supaya tidak tersalah pakai.

Selanjutnya adat atau upacara berinai, makna dan tujuan dari perhelatan upacara ini adalah untuk menjauhkan diri dari bencana, membersihkan diri dari hal-hal yang kotor, dan menjaga diri segala hal yang tidak baik. Di samping itu tujuannya juga untuk memperindah calon pengantin agar terlihat lebih tampak bercahaya, menarik, dan cerah. Upacara ini merupakan lambang kesiapan pasangan calon pengantin untuk meninggalkan hidup menyendiri dan kemudian menuju kehidupan rumah tangga. Dalam ungkapan adat disebutkan “Malam berinai disebut orang, Membuang sial muka belakang, Memagar diri dari jembalang, Supaya hajat tidak terhalang, Supaya niat tidak tergalang, Supaya sejuk mata memandang, Muka bagai bulan mengambang, Serinya naik tuah pun datang. Berinai bukan sekadar memerahkan kuku, namun mempersiapkan pengantin agar dapat menjalani pernikahan tanpa aral halangan”.

Upacara ini dilakukan pada malam hari, yaitu dimalam sebelum upacara perkawinan dilangsungkan. Bentuk kegiatannya bermacam-macam asalkan bertujuan mempersiapkan pengantin agar tidak menemui masalah di kemudian hari. Dalam upacara ini yang terkenal biasanya adalah kegiatan memerahkan kuku, tetapi sebenarnya masih banyak hal lain yang perlu dilakukan. Upacara ini dilakukan oleh ninik mamak dibantu oleh sanak famili dan kerabat dekat. Upacara berinai bagi pasangan calon pengantin dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Hanya saja, secara teknis tempat kegiatan ini dilakukan secara terpisah, bagi pengantin perempuan dilakukan di rumahnya sendiri dan bagi pengantin laki-laki

dilakukan di rumahnya sendiri atau tempat yang disinggahinya. Namun, dalam adat perkawinan Melayu biasanya pengantin laki-laki lebih didahulukan, bahkan pada saat sekarang ini dilakukan bersama kedua pasangan pengantin.⁴

Setelah upacara berinai selesai, kemudian dilanjutkan dengan upacara tepuk tepung tawar. Makna dari upacara adalah pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin dan seluruh keluarganya, di samping itu juga bermakna sebagai simbol penolakan terhadap segala bala dan gangguan yang mungkin diterimanya kelak. Upacara ini dilakukan oleh unsur keluarga terdekat, unsur pemimpin atau tokoh masyarakat, dan unsur ulama. Yang melakukan tepuk tawar terakhir juga bertindak sebagai pembaca doa. /Tepuk Tepung Tawar hakikatnya adalah pertanda, bahwa para tetua melimpahkan restu dan doa, bahwa marwah pengantin kekal terjaga. Dalam ungkapan adat disebutkan bahwa makna dari Tepuk Tepung Tawar adalah :Menawar segala yang berbisa, Menolak segala yang menganiaya, Menepis segala yang berbahaya, Mendingin segala yang menggoda, Menjauhkan dari segala yang menggila. Jadi, upacara Tepuk Tepung Tawar bermakna sebagai doa dan pengharapan. Dalam pantun nasehat disebutkan: Di dalam Tepuk Tepung Tawar, terkandung segala restu, terhimpun segala doa, terpateri segala harap, tertuang segala kasih sayang.

Kegiatan ini dilakukan dengan rincian: menaburkan tepung tawar ke telapak tangan kedua pengantin, mengoleskan inai ke telapak tangan mereka, dan menaburkan beras kunyit dalam bunga rampai kepada kedua pengantin. Setelah upacara ini selesai berarti telah selesai upacara inti perkawinan secara adat. Setelah

⁴M. Ali (ninik mamak), Desa Ranatau Baru, *Wawancara*, 22 Juni 2013

itu tinggal melakukan upacara-upacara pendukung lainnya, seperti upacara nasehat perkawinan dan jamuan makan bersama.⁵

B. Macam-Macam Pelanggaran Adat terhadap Pelaksanaan Walimatul ‘urusy.

1. Tidak meminta izin kepada Ninik Mamak, Datok Sati selaku pemucuk adat.

Di dalam aturan adat yang terlaksana di Desa Rantau Baru Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan bahwa apabila salah seorang atau keluarga yang akan melaksanakan suatu pernikahan atau *walimatul ‘urusy*, ia tidak meminta izin atau memberitahu kepada Ninik Mamak Atau Datuk sati selaku Pucuk adat, apapun alasannya maka, di kenai sanksi adat dengan membayar atau menyembelih seekor kerbau.⁶ Contoh Ujang pelaku yang tidak mengikuti adat dalam pelaksanaan *walimah*, hal ini terjadi pada tahun 2007, ia tidak meminta izin atau melapor kepada Ninik Mamak yaitu Datok Sati selaku pemucuk Adat. Alasannya adalah pada waktu itu ia telah sah menikah secara agama dan tercatat dipemerintah dan ia pun dijatuhi sanksi dengan membayar 1 seekor kerbau, karena tidak terpenuhinya sanksi yang terlalu berat dinggapnya, dan ia pun tidak bisa melangsukan selamatan atau *walimatul ‘urusy* dikampungnya tepatnya di Desa Rantau Baru. Maka ia hanya melaksanakan nikah saja di daerah pangkalan kerinci tepatnya di jalan cempaka dan tidak melaksanakan walimah karena keterbatasan ekonomi.⁷

⁵Yusrizal (datuk paduko suanso), Desa Ranatau Baru, *Wawancara*, 22 Juni 2013

⁶Mahadir, (Tokoh Adat), *Op.Cit*, 18 Februari 2013

⁷Wardi, warga (seorang terkena sanksi pelanggaran adat), *Op.Cit*, 18 Februari 2013

Disamping itu ada juga seorang warga bernama Wardi atau kerap disapa kuri, sekarang berusia 37th ia menuturkan bahwasanya pernah menikah tetapi istri pertamanya meninggal dikarenakan sakit kanker, setelah istrinya meninggal, Wardi pun menikah lagi dengan seorang janda pada tanggal 3 februari 2008. Pada saat itu dia ingin melaksanakan *walimatul 'urusy* dengan sederhana tanpa harus diketahui orang banyak, dan ia pun tidak ada melaksanakan rapat atau melapor dengan penegak atau pemucuk adat, karna hal ini dianggapnya walimah yang tidak besar besaran dikarenakan keterbatasan ekonomi dan hal ini pun perkawinanya yang kedua kali bagi dirinya, tetapi dimata adat namanya perkawinan atau melaksanakan walimah atau selamat itu tetap menjadi salah satu kewajiban para pemuka adat atau ninik mamak untuk mengawasi dan mengetahui , maka pada saat itu malam Selasa datok sati serta perangkat bersilahturahmi mendatangi rumah wardi, setelah itu datok sati meminta penjelasan kepada tuan rumah tentang adanya pelaksanaan walimah di rumah wardi, dengan tidak adanya melaksanakan rapat permohonan izin ingin melaksanakan walimah kepada datok sati, maka hal ini dianggap oleh datok sati melanggar ketentuan adat yang sudah berlaku dari nenek moyang mereka sesuai dengan adat *diinjak layu diubah mati*, artinya hukum adat tidak bisa dirubah. Maka wardi di kenakan sanksi membayar seekorkerbau, tetapi disamping itu wardi tidak bisa membayar denda tersebut karena keterbatasan ekonomi, karena ia hanya seorang nelayan. Disamping itu datok sati tidak bisa memberikan izin untuk melaksanakan walimah di desa rantau baru, karena hal seperti ini adalah adat yang tidak boleh dirubah atau dilanggar. Maka dengan itu Wardi berinisiatif untuk

melaksanakan walimah atau selamatan ditempat lain yakni ditempat mempelai wanita yang berada diluar desa Rantau Baru.⁸

2. Tidak Menyerahkan rumah kepada Ketua Simondo.

Maksudnya ialah apabila seseorang melaksanakan *walimatul 'urusy*, maka ia harus memberikan hak rumah sepenuhnya kepada ketua simondo dan dibantu oleh ketuo anak betino selama pelaksanaan walimah. Adapun hak rumah disini meliputi dekorasi rumah,tata letak serta rias pengantin, selanjutnya setelah ada serah terima oleh pihak rumah kepada ketua simondo, maka semua pelaksanaan menjadi hak dan tanggung jawab ketua simondo, dan apabila hal ini tidak dilaksanakan atau dilanggar serta dirubah orang yang melaksanakan walimah, maka orang yang melaksanakan walimah akan dikenakan sanksi berupa seekor kerbau. Dan apabila selama pelaksanaan walimah ketua simondo melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal, maka ketua simondo pun bisa dikenakan sanksi oleh datuk sati.⁹

3. Memasang Tonggol Tumbang

Yang dimaksud dengan Tonggol ialah bendera Adat, bendera adat ini melambangkan adanya seseorang yang sedang melangsungkan pernikahan atau walimatul 'urusy pada suku melayu dan tonggol ini juga melambangkan kebesaran atau drajat datuk sati, sebenarnya dalam pemasangan tonggol tersebut tidak lah sembarangan orang, melainkan orang-orang tertentu dari pihak keluarga

⁸Wardi, warga (salah seorang terkena sanksi pelanggaran adat),*Op.Cit*, 18 Februari 2013

⁹Mahadir, (Tokoh Adat), *Op.Cit*, 18 Februari 2013

yang melaksanakan pernikahan, adapun sebelum pemasangan tonggol ini ada beberapa yang perlu diperhatikan, contohnya tidak boleh timbang, jika tumbang sama artinya jatuhnya martabat dan drajat seorang datuk sati selaku pucuk adat yang sangat dihormati. karena hal tersebut lama-kelamaan sering diabaikan atau tidak diperhatikan maka terjadilah beberapa kesalahan yang fatal.

Seperti kasus yang terjadi pada Marjoni 39 tahun ia juga pernah melanggar adat dalam pelaksanaan walimahnya hal ini terjadi sekitar tahun 2009. Adapun pelanggarannya ia memasang Tonggol tidak kokoh sehingga berakibat tumbang atau terjatuh Tonggol tersebut dan pada waktu itu yang memasang bukanlah dia melainkan orang lain yang bernama Herman hal ini dikarenakan kurangnya perhatian terhadap apa-apa yang telah dijelaskan oleh ninik mamak sehingga terabaikan dikarenakan kesibukan hari pestanya, disini Ninik mamak atau Datuk Sati tidak memandang siapa yang memasang, melainkan yang bertanggung jawab penuh adalah orang yang melaksanakan walimah. Dan ia dikenakan sanksi adat dengan denda seekor Kambing.¹⁰

4. Nikah sasuku

Dalam adat melayu di Desa Rantau Baru tidak boleh nikah sasuku Maksud sasuku disini adalah sesusuan, semamak atau seibu, sasuku itu termasuk juga satu suku yang ada dikampung, pagito (anak angkat) serta pagito punah yaitu anak angkat sampai tujuh keturunan tidak boleh dinikahi, inilah orang-orang yang tidak boleh dinikahi dalam adat sasuku. Adapun jika hal ini dilanggar maka seseorang

¹⁰Marjoni, (warga seorang terkena sanksi pelanggaran adat), *Op.Cit*, 18 Februari 2013

yang melanggar akan dikenakan sanksi adat berupa seekor kerbau dan hal ini juga bisa berimbas kepada pengusiran dari kampung tersebut¹¹

C. Sanksi Adat Terhadap Pelaksanaan walimatul ‘urusy.

Adapun sanksi adat terhadap pelaksanaan *walimatul ‘urusy* adalah:

1. Membayar denda seekorkerbau.

Adapun sanksi dengan membayar seekor kerbau yakni sanksi adat seperti ini berlaku terhadap seseorang yang melanggar ketentuan adat dalam pelaksanaan walimatul ‘urusy dimana seseorang dalam pelaksanaannya tidak meminta izin kepada datok sati selaku pemucuk adat untuk melaksanakan suatu pernikahan atau walimatul ‘urusy, menyerahkan rumah adat terhadap kletua simondo dan juga nikah sesuku.

2. Membayar seekor kambing

Maksudnya ialah jika seseorang yang akan melaksanakan walimatul ‘urusy, tetapi, dalam pelaksanaannya jika terdapat tonggol yang tumbang tonggol disini yaitu melambangkan tingginya martabat datok sati, dimana jika hal ini jatuh atau tumbang, maka seseorang yang akan melaksanakan walimatul ‘urusy akan dikenakan sanksi berupa denda adat seekor kambing.

¹¹M. Nazir, (Ninik mamak), di Desa Rantau Baru, *Wawancara*, 13 Mei 2013

3. Dikucilkan dari tengah-tengah masyarakat.

Yang dimaksud dikucilkan disini adalah apabila keluarga pelaku pelanggaran adat dalam pelaksanaan *walimahtul 'urusy*, mengadakan suatu acara kembali, baik pesta, khitanan atau mengadakan hajatan lainnya, para undangan yang datang sangat sedikit bila dibandingkan dengan keluarga lainnya. Mereka beranggapan orang yang melanggar dianggap tidak mematuhi yang telah sama-sama ditetapkan dan disepakati oleh adat.

4. Diasingkan dari kampung.

Sedangkan yang dimaksud diasingkan dari kampung disini yakni, jika seseorang yang melakukan pelanggaran adat nikah sesuku dan dimana seseorang yang melanggar tidak memenuhi sanksi yang telah ditetapkan adat maka, seperti membayar seekor kerbau maka, ia pun akan diasingkan dari kampung karena hal ini memang ketentuan yang sudah ada dan disepakati.

Di samping itu berdasarkan laporan salah seorang ninik mamak, bahwa dengan adanya sanksi adat tersebut, juga akan membawa dampak negatif lainnya, seperti kasus Marjoni Adapun pelanggarannya ia memasang Tonggol tidak kokoh hingga berakibat tumbang atau terjatuh Tonggol tersebut dan pada waktu itu yang memasang bukanlah dia melainkan dari sanak saudara yang dipercayai bernama Herman. Dan ia dikenakan sanksi adat dengan denda seekor Kambing merupakan sanksi yang mutlak atau wajib harus dibayar. Sebenarnya sanksi denda ini bisa diperkecil lagi kebawah menjadi 7 ekor ayam tetapi kejadian ini sangat

fatal, karena yang mengetahui tonggol ini tumbang adalah datuk sati. Sedangkan tonggol itu adalah simbol drajat seorang datuk sati sebagai pemucuk adat. Dengan keterbatasan ekonomi sebagai seorang nelayan, orang tuanya pun menjual tambak ikanya yang menjadi salah satu tumpuan hidupnya demi memenuhi sanksi yang dijatuhkan pada dirinya atas pernikahan anaknya.

Pendapat lain ujang salah seorang yang pernah terkena sanksi adat, menurutnya sanksi adat yang ada pada pelaksanaan pernikahan, walimah tersebut sangat memberatkan bagi seseorang yang melaksanakan walimah, alasannya karena bercermin dari kejadian kasus yang menimpa dirinya. Dimana ia telah sah menikah secara agama dan pemerintah, tetapi ia tidak melaksanakan proses secara adat, seperti peminagan secara adat, walimah secara adat dan hal-hal lain yang bersangkutan tentang adat dalam pernikahan dan walimatul 'urusy. Tetapi dimata ninik mamak adat adalah sebuah aturan hukum yang tidak boleh dilanggar, ditinggalkan, maka dari itu ujang pun dikenakan sanksi adat berupa seekor kerbau sebelum pelaksanaan walimahnya, dan ia pun tidak bisa melaksanakan walimah di Desa Rantau Baru dikarenakan tidak bisa memenuhi sanksi yang diberikan oleh ninik mamak selaku kepala adat tertinggi, hal seperti ini memberatkan dirinya karena dimatanya adat terlalu mempermasalahkan yang sebenarnya telah disahkan oleh agama dan negara sehingga membuat dirinya tidak menyetujui adanya sanksi adat yang ada saat sekarang ini.¹² Pendapat lain dituturkan oleh Wardi, ia juga salah seorang yang terkena sanksi adat, menurutnya sanksi adat seperti itu seharusnya tidak lagi dilaksanakan atau ditegakkan, karena dengan adanya sanksi

¹²Ujang, (salah seorang terkena sanksi pelanggaran adat), *Op. Cit*, 13 Mei 2013

adat seperti itu membuat pelaksanaan pernikahan, walimah menjadi terhambat. Ia tidak menyetujui adanya aturan dan sanksi adat seperti ini, karena menurutnya dengan adanya hal seperti ini membuat seseorang yang ingin melaksanakan sebuah pernikahan, walimah, selalu terikat dan dibayang-bayangi dengan aturan adat, contohnya saja seperti anak angkat, sesuku yang berada pada satu kampung, tidak boleh dinikahi padahal dalam syari'at islam tidak ada larangan, kecuali ada hubungan nasab dan sesusuan.¹³

Selanjutnya pendapat M. Kabir ia mengatakan bahwasanya aturan dan sanksi adat itu sangat dihormati dan perlu diterapkankarena hal ini memang sudah adak sejak zaman nenek moyang mereka dulu yang tidak boleh dilanggar dengan berpegang pada prinsip adat *diinjak layu diubah mati*.¹⁴

D. Proses Sanksi adat Terhadap Pelaksanaan Walimatul 'urusy.

Dalam pelaksanaan sanksi adat ini tidak sembarangan, sebab ada mekanisme yang harus dilewati oleh seseorang dalam pelaksanaanya dan adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama dalam kesepakatan yang diatur oleh ninik mamak, datuk sati yang mengajarkan dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Yaitu kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan disebuah Desa tidak boleh dipinggirkan dalam segala sesuatu permasalahan yang konteks berada dalam wilayah Desa

¹³Wardi. Warga (salah seorang yang terkena sanksi adat), *Op. Cit*, 13 Mei 2013

¹⁴M. Kabir (masyarakat), Desa Ranatau Baru, *Wawancara*, 13 Mei 2013

tersebut. Maka, peranan kepala desa sangatlah penting dan termasuk garda terdepan. Adapun kepala desa berpungsi sebagai mediasi antara ninik mamak dengan pelaku pelanggaran adat terhadap pelaksanaan *walimatul 'urusy*, setelah adanya laporan dari ninik mamak, datuk sati atau pun perangkat ninik mamak lainnya tentang pelanggaran tersebut. Disini kepala desa tidak terlalu banyak atau terlalu jauh ikut campur dalam permasalahan ini dikarenakan pelanggaran seperti ini tidak bisa diselesaikan secara sepihak melewati jalur hokum, melainkan diselesaikan melalui jalur adat.¹⁵

Kedua dikarenakan setiap orang pada masyarakat suku melayu memiliki Ninik mamak yang menjadi pedoman dan juga sebagai orang tua kedua setelah orang tua kandungnya. Seperti suku melayu tuo diberi gelar *Munjo Sindodan* melayu malailing diberi gelar *Paduko Momatserta* melayu mudo diberi gelar *Paduko Suanso*. Ketiga suku tersebut dibawah payung datuk sati, jadi disini datuk sati lah orang yang tertinggi sebagai pemucuk adat. Selanjutnya setelah adanya musyawarah yang telah difasilitasi oleh kepala desa terhadap ninik mamak dan pelaku pelanggaran adat terhadap pelaksanaan *walimatul 'urusy*, maka setelah kepala desa menyerahkan sepenuhnya permasalahan tersebut kepada ninik mamak, datuk sati beserta perangkatnya, maka selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut menjadi permasalahan dan tanggung jawab ninik mamak menyelesaikan. Selanjutnya apabila dalam musyawarah tersebut tidak membuahkan putusan terhadap pernikahan dan pelaku pelanggaran adat terhadap

¹⁵ M. Syahir, (Kepala Desa), *Op. Cit*, 30 Februari 2013

pelaksanaan *walimatul 'urusy*, maka akan dilanjutkan pada jalur adat yang kedua seperti halnya kasus yang terjadi pada Marjoni (pelaku pelanggaran adat).¹⁶

Dan yang *ketigapada* jalur adat kedua atau tahap ketiga ini, maka kekuatan datuk sati sebagai pimpinan tertinggi di masing-masing suku di Desa Rantau Baru inilah sebagai jalan terakhir untuk penyelesaian kasus tersebut dengan melihat *Usul Paise* maksudnya adalah mencari dimana titik kesalahannya. Datuk sati sebagai pemucuk adat bermusyawarah dengan bijak dan adil, seperti yang terjadi pada marjoni yang berasal dari suku melayu Mudo dan istrinya yang berasal dari suku melayu Mudo juga. Pada tahap ketiga ini apapun keputusan musyawarah oleh datuk sati maka harus bisa diterima oleh pihak pelaku pelanggaran terhadap pelaksanaan *walimatul 'urusy* dan membayar sanksi yang telah ditentukan sebagai mana yang telah ada dan diatur sejak nenek moyang mereka *diinjak layu diubah mati*. Adapun dalam pelaksanaan sanksi tersebut, setelah ada keputusan oleh datuk sati maka pelaku pelanggaran adat terhadap pelaksanaan *walimatul 'urusy* membayar ,sanksi dengan memotong kerbau sesuai dengan keputusan datuk sati, setelah dipotong kerbau tersebut lalu dimasak dan mengundang semua masyarakat yang ada di desa tersebut untuk dimakan bersama-sama.¹⁷

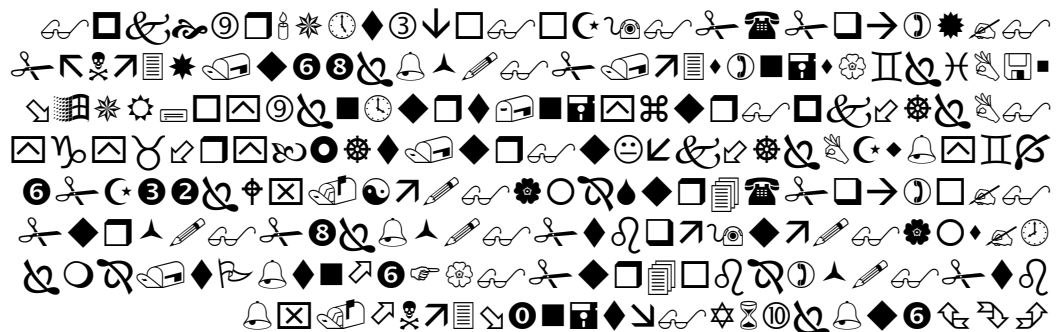
¹⁶ Afrizal, (Ninik Mamak), di Desa Rantau Baru, *Wawancara*, 13 Mei 2013

¹⁷ Ibnu Suib, Datuk Sati (pucuk adat), *Wawancara*, Tanggal 30 Februari 2013

E. Tinjauan Hukum Islam tentang sanksi adat terhadap pelaksanaan walimatul

‘urusy

Sebagaimana yang kita ketahui, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. sementara itu perkawinan menurut perundangan hukum islam adalah akaq yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-qur'an surah An-nisaa ayat 1



Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. (Qs. An-Nisaa ayat 1).¹⁸

Selain itu perkawinan merupakan anjuran atau sunnah Rasul yang salah satu tujuannya ialah untuk menjaga *Nasab* (keturunan). Perkawinan juga merupakan jalinan suci antara dua insan yang berbeda jenis dan watak yang mempunyai nilai dua sekaligus, yakni sebagai perikatan jasmaniyah dan rohaniyah.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: CV.Toha Putra, 1989), h. 77

Dua nilai inilah yang membawa konsekuensi hukum agama yang menetapkan eksistensi manusia dengan rasa Iman dan Taqwa memberikan pelajaran bagi manusia terhadap apa yang harus dikerjakan, dianjurkan, diperbolehkan, dibenci dan yang harus ditinggalkan.

Sebagai ikatan jasmani dan rohani, perkawinan merupakan suatu pertalian untuk mewujudkan kemaslahatan hidup, baik di dunia maupun akhirat. Bukan saja gerak senada dan langkah seiring untuk mencapai kebahagiaan dunia, tetapi yang harus ada kesamaan dan berdo'a untuk memperoleh kebahagiaan akhirat sehingga terbentuklah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Sebab antara suami, istri dan anggota keluarga lainnya mempunyai keragaman langka dalam nilai arah yang sama.

Oleh karena itu perkawinan merupakan jalinan suci yang harus dijaga kesuciannya. Maka hendaklah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Baik aturan syari'at itu sendiri maupun aturan adat lainnya yang disebut dengan *adat bersendikan syara'*, *syara' bersendikan kitabullah*, maksudnya (aturan adat seiring dengan syari'at islam dan kitabullah).

Di samping pernikahan, *walimatul 'urusy* atau resepsi pernikahan juga sunnah Rasulnya. Sunnah Rasul yang berarti suatu tradisi yang telah dicontohkan oleh Rasul untuk dirinya dan untuk umatnya.

Disyari'atkan *walimatull 'urusy* dalam Islam bagi yang mampu adalah suatu cara atau pencetusan tanda gembira serta pemberitahuan kepada sanak saudara, tetangga dan khalayak masyarakat banyak bahwa seseorang telah

melaksanakan suatu pernikahan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga.¹⁹

Dari kata lain bahwasanya dalam pelaksanaan *walimah*, jika tidak mampu dengan memotong kambing atau domba, cukup dengan gandum maupun kurma sesuai dengan keadaan dan kemampuan.

Hadis Nabi s.a.w

عن صفية بنت شيبة قالت : اولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نساء
بمد ين من شعير . (رواه البخارى)

“Syafiyyah binti Syaibah mengatakan, “Nabi s.a.w menyelenggarakan walimah ketika beliau menikahi salah seorang istrinya hanya dengan dua mud gandum” (HR. Bukhari).²⁰

Dari hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa *walimah* itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai dengan kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi s.a.w. bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan *walimah* oleh beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.²¹

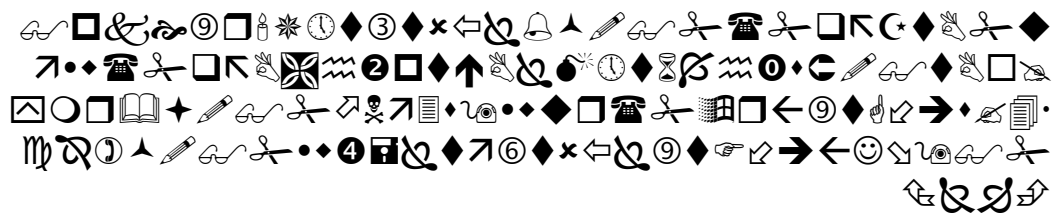
Mengacu pada kenyataan itu, dilihat dari historis munculnya, sanksi pelanggaran adat terhadap pelaksanaan *walimatul ‘urusy*, seperti harus minta izin terlebih dahulu kepada ninik mamak, datok sati, menyerahkan rumah kepada ketua simondo, memasang tonggol tidak boleh jatuh atau tumbang selama dimulainya

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* h. 117

²⁰ Imam Muhammad bin Ismail Amir Yamin, *Op. Cit.* h. 301.

²¹ Slamet Abidin, *op.cit.*, h. 151.

pelaksanaan walimah, hal ini dikarenakan nikah mamak dan datuk sati adalah sebagai hal orang tua sendiri, maka dari itu diharuskan meminta izin sebelum melaksanakan pernikahan sebagaimana layaknya orang tua kandung sendiri. Sedangkan memasang tonggol tidak boleh tumbang yakni tonggol adalah sebagai simbol adat, layaknya seperti bendera kebangsaan indonesia yang selalu terjaga dan dihormati. Tonggol ini juga merupakan simbol betapa tingginya derajat datuk sati dalam adat tersebut, Sehingga pada adat melayu seperti hal diatas tidak boleh dilanggar. Melihat dari kasus yang ada penulis mengamati *tali sepilin tigo* tidak sejalan dengan syari'at dan pemerintah, dimana adat lebih besar pengaruhnya terhadap permasalahan yang ada, dibandingkan dengan aturan syara' dan pemerintah. Sedangkan ditinjau menurut Hukum Islam sanksi adat seperti ini sudah menyimpang dari syari'at islam dan menzolimi atau memberatkan seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan atau *walimatul 'urusy*, yang dimana adat tidak membolehkan atau mengharamkan sesuatu yang di halalkan Allah. Sebagaimana termuat dalam Firman Allah SWT(Qs. Al-Maidah ayat 87).



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukaioorang-orang yang melampaui batas.²²

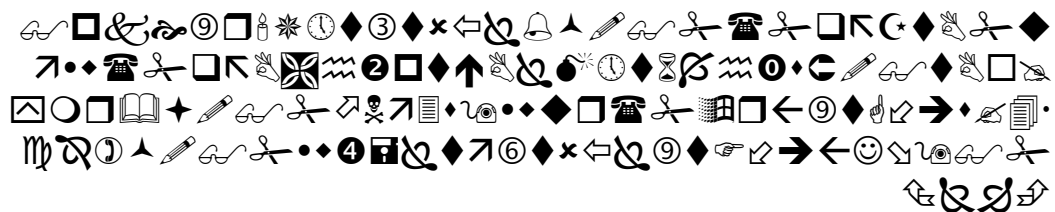
²² Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 78

Oleh karena itu, apabila diantara mereka ada yang melanggar adat terhadap pelaksanaan *walimatul 'urusy*, maka hukumnya mubah atau boleh. Tidak ada nash dan tidak ada halangan bagi mereka untuk melaksanakan pernikahan serta *walimatul 'urusy*, karena pada dasarnya dalam pelaksanaan pernikahan dan *walimatul 'urusy* tidak ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang, seperti menikahi saudara kandung, sesusuan, mengadakan hiburan orgen tunggal, kemaksiatan, mabuk-mabukan, serta pemubaziran terhadap makanan atau hidangan.

Kemudian pelaksanaan *walimah* tersebut tidak tergolong kepada yang dilarang syari'at islam, seperti pemubaziran, mabuk-mabukan melakukan perbuatan maksiat, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab tiga. Ditinjau dari segi hukum serta pelaksanaannya. Mereka melaksanakan *walimah* atas dasar mengucapkan syukur dan nikmat yang telah diberikan kepadaNya, walaupun dalam pelaksanaan *walimah* tersebut tidak menunjukkan kemewahan seperti kebanyakan yang terjadi saat sekarang ini. Disisi lain pun mereka melaksanakan *walimah* sesuai dengan ketentuan syari'at islam, yakni mengundang beberapa tetangga dekat rumah serta memberikan jamuan atau hidangan ala kadarnya.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan ini, penulis mengamati, sanksi yang diberikan seperti wajib memotong kerbau menimbulkan kejanggalan dan bertentangan dengan ketentuan syari'at islam. Karena adat tidak lagi sejalan dengan ketentuan syari'at dan pemerintah, dimana adat lebih menonjolkan sanksinya tanpa mengkaji lebih dalam syari'at islam sebagaimana

yang telah diatur. Apabila melanggar ketentuan adat yang berlaku sebelum pelaksanaan *walimah*, maka sebelum melangsungkan acara *walimatul 'urusy* bagi yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi adat wajib membayar atau memotong kerbau sebagai denda *adatdiinjak layu diubah mati*, setelah sanksi adat telah dipenuhi barulah pelaksanaan *walimah* boleh dilanjutkan kembali walaupun itu hanya seperti selamatan biasa. Hal seperti ini sangat memberatkan bagi seseorang yang akan melaksanakan *walimatul 'urusy* karena tidak semua orang memiliki ekonomi yang memadai untuk memenuhi sanksi tersebut. Disamping sanksi ketetapan adat seperti itu dapat penulis lihat bahwasannya adat tidak boleh atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Seperti firman Allah : (Qs. Al-Maidah ayat 87).



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukaiaorang-orang yang melampaui batas.²³

²³Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 78

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pelanggaran adat terhadap pelaksanaan walimatul ‘urusy .seperti tidak meminta izin kepada ninik mamak, datuk sati, tidak menyerahkan rumah kepada ketua simondo dan tidak boleh memasang tonggol atau bendera adat yang melambangkan kehormatan datuk sati. dimana ketentuan adat yang berlaku seperti ini tidak boleh dilanggar oleh masyarakat yang melaksanakan walimatul ‘urusy.
2. Sanksi bagi pelanggaran adat terhadap pelaksanaan walimatul ‘urusy, ialah membayar seekor kerbau, membayar seekor kambing, dikucilkan, dan diasingkan dari kampung.
3. Tinjauan hukum islam terhadap sanksi yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan adat dalam pelaksanaan walimatul ‘urusy bahwasanya pada umumnya memberatkan kepada keluarga yang melaksanakan walimatul ‘urusy maka, kemudaran ini harus dihilangkankan kecuali, jika ketentuan adat tersebut berlaku atas kesepakatan ninik mamak dan disepakati oleh warga adat maka, ketentuan sanksi tersebut bermaksud untuk mendisiplinkan warga adat.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan atau pemberian sanksi terhadap pelanggaran adat pada pelaksanaan walimah seperti memotong kambing atau kerbau di desa Rantau Baru Kecamatan Kerinci hendaknya ninik mamak dan jajaranya mengkaji ulang terhadap hal tersebut, agar tidak memberatkan seseorang serta melenceng dari i'tikad baik pelaksanaan walimah, dan ketentuan syari'at.
2. Masyarakat di Desa Rantau Baru Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan hendaknya lebih meningkatkan pengetahuan tentang syari'at islam, tentang kewajiban dan larangan-larang Allah serta *walimatul 'urusy*.
3. Disarankan juga kepada masyarakat di Desa Rantau Baru Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan agar terus berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah, bertaqwa kepada Allah swt, mengikuti sunnah Rosulullah Saw. Bahwasanya manusia itu diciptakan berpasang-pasangan agar dapat mengembang biakan keturun. karena dengan melakukan perintah Allah s.w.t berarti kita menanamkan kecintaan kita kepada Allah s.w.t. begitu juga kepada Rasulullah s.a.w.amin

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Penerjemah Besus Hidayat Amin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 2
- Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka I*, Penerjemah Ahmad Subandi, (Jakarta: Lentera, 2007)
- Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Khazwiny, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar-Fikr, 1995), Juz 2
- Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar-El Marefah, 1995), Juz 13
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Bogor, Kencana 2003), Cet. Ke-1
- Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Asy-Syifa', 1981), Cet. Ke-II
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996)
- Dedi Junaed, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), Cet. Ke-1
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), Jilid II
- Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah M.A. Abdurrahman & A. Haris Abdullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) Buku 2
- Ibrahim Muhammad Al-Jalal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1986)
- Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 3-6, Cet. 3
- Imam Malik Bin Annas, *Al-Muaththa' Imam Malik*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 3, Cet. 2
- Imam Muhammad bin Ismail Amir Yamin, *Subulussalam Syarh Bulughul Maram*, (Beirut: Dar-Fikr, 1991) Juz 3

- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, Penerjemah Syaifuddin Anwar & Misbah Mustafa, (Surabaya: Bina Iman, 2007) Buku 2
- Jamaan Nur, *Fikih Munaqahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), Cet. Ke-1
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet 4
- M. Nasiruddin Al-Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet. Ke-I
- M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Jilid 3, Cet. 1
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990)
- Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978)
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Penerjemah Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT Alma'arif, 1986)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), Jilid VI. Cet. Ke-1
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan & Budiman, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet 1
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin *Fiqih Munaqahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Shaleh bin Ghanim As-Sadlan, *Mahar dan Walimah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996)
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998)

Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih EmpatMazhab*, Penerjemah Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2010)

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I*, Penerjemah Muhammad Afifi Abdul Hafiz, (Jakarta: Almira, 2010), Buku 1